

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Barang secara ekonomis sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik dalam lingkungan organisasi bisnis, pemerintahan, maupun individu. Perlakuan barang secara ekonomis dalam definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan baik organisasi bisnis, pemerintahan, maupun individu memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan yang dimiliki adalah dalam memperlancar kegiatannya; sedangkan perbedaannya adalah dalam fungsinya. Fungsi barang (asset) bagi organisasi bisnis lebih diutamakan untuk menghasilkan profit dalam kegiatan usahanya; sedangkan bagi organisasi pemerintahan lebih diutamakan pada peningkatan tugas pokok dan fungsi pelayanan bagi aktifitas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat umumnya.

Dengan demikian, asset (aktiva) yang digunakan dalam perlakuannya diperlukan system pengelolaan terhadap kekayaan daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntanbel dalam pencatatan sampai pada pelaporan keuangan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban penggunaan keuangan Negara. Sehingga asset (aktiva) tersebut tetap pada posisi nilai yang secara wajar

Akuntansi barang daerah berperan penting dalam proses penyajian informasi asset yang meliputi; Jenis, Jumlah dan Nilai Rupiahnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran transaksi barang daerah akan tercermin dalam

pendapatan (bila aktiva tersebut dijual oleh pemerintah) atau tercermin dalam biaya (bila aktiva tersebut dibeli oleh pemerintah). Sedangkan dalam neraca, pengaruh transaksi barang daerah akan tercermin dalam bertambah atau berkurangnya aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana.

Akuntansi untuk aktiva tetap adalah saat pengakuan (*timing*) aktiva, penentuan nilai tercatat (*Carryngg Value*) asset tetap. Dalam perlakuan akuntansi barang daerah sebagai aktiva tetap dalam definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang terdapat pada neraca daerah, maka perlu dilakukan penyusutan aktiva tetap tersebut.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) merupakan salah satu unit organisasi Pemerintah Kabupaten yang membimbing pengembangan sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan daerah di bidang ekonomi. Dalam meningkatkan pelayanan di bidang perekonomian dan kesejahteraan kepada masyarakat, maka untuk memperlancar program kegiatan dinas yakni kendaraan bermotor.

Aktiva tetap kendaraan bermotor yang diperoleh dari pembelian atau pengadaan yang seluruh atau sebagian dananya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II atau dana diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah yang dikuasai oleh Daerah, maka

perlu dilakukan pencatatan atau inventarisasi yang akurat, mulai dari penilaian harga perolehan kendaraan bermotor dengan menjumlahkan harga faktur dan seluruh biaya yang timbul sampai pada kendaraan bermotor tersebut siap dipakai; kemudian menghitung penyusutan yang sudah ditetapkan dengan terlebih dahulu menentukan umur ekonomis dari kendaraan bermotor; setelah itu menyajikannya dalam laporan keuangan dalam bentuk neraca. Kondisi yang terjadi pada Dinas Koperindag Kabupaten Lembata, hingga saat ini belum melaksanakan akuntansi tersendiri. Penyusunan laporan keuangan masih bermuara atau terpusat pada Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Dispenda PKAD).

Perlakuan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor, sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up oleh Pemerintah Daerah pada setiap akhir tahun buku dari tahun 2005 - 2012 tidak dilakukan beban penyusutan. Hal ini, nampak pada laporan keuangan dalam bentuk neraca daerah per 31 Desember 2011 sebagai neraca awal per 10 Januari 2012 dan neraca Daerah per 31 Desember 2012. Pencatatan menurut Instansi Pemerintah dilakukan pada periode berikutnya dengan harga perolehan dan biaya pemeliharaan tetap, yang dianggarkan pada satu periode berjalan. Akibatnya, nilai aktiva tetap kendaraan bermotor yang nampak pada neraca pada akhir periode akuntansi adalah nilai yang tidak sewajarnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya *akun dana depresiasi*. Namun, dalam penyusunan neraca daerah tidak tercantum akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Sesuai perlakuan akuntansi aktiva tetap, bukannya suatu proses penilaian aktiva atau prosedur pengumpulan dana untuk mengganti aktiva; tetapi adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap ke periode akuntansi. Depresiasi digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti, seperti; gedung, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlakuan akuntansi penyusutan terhadap semua aktiva tetap daerah yang ada.

Dengan demikian, Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan milik pemerintah daerah pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga data-data yang dilaporkan benar-benar diakui keakuratannya, maka posisi aktiva tetap kendaraan bermotor dapat mewujudkan pengelolaan barang daerah yang memenuhi akuntabilitasnya.

Berikut ini adalah data pengadaan aktiva tetap kendaraan bermotor daerah pada Dinas Koperindag Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tahun pengadaan 2005-2012.

Tabel 1

Daftar Pengadaan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor Daerah  
Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata  
Tahun 2005-2012

Tahun	Jenis Barang	Merek/Tipe/CC	No. Polisi	Waktu Pembelian	Harga Perolehan (Rp.)
2005	Roda Dua	Honda Supra X NF 100.D	EB 553 F	12 Januari	13.500.000
2006	Roda Empat	Mobil Pick Up/1800	EB 904 F	22 Juli	120.235.500
2007	Roda Dua	Honda Mega Pro/160	EB 730 F	28 Oktober	22.433.000
	Roda Dua	Honda Mega Pro/160	EB 731 F	28 Oktober	22.433.000
	Roda Dua	Honda Mega Pro/160	EB 732 F	11 November	22.434.000
2008	Roda Dua	Honda Mega Pro/160	EB -	12 Oktober	22.483.000
	Roda Dua	Honda Mega Pro/160	EB -	12 Oktober	22.483.000
2009	-	-	-	-	
2010	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
Total Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor					246.001.500,-

*Sumber : Data Sekunder Dinas Koperindag Kab. Lembata 2013*

Berdasarkan latar belakang di atas; dimana belum adanya perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap kendaraan bermotor dengan judul :

“Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Lembata”.

## **B. Perumusan Masalah**

Mengacu pada uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Lembata?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sistem akuntansi yang benar terhadap perlakuan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Penyusunan Neraca Daerah Kabupaten Lembata.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lembata dalam pengelolaan aktiva tetap daerah yang dimiliki terutama perlakuan akuntansi penyusutan aktiva tetap kendaraan bermotor dalam penyusunan neraca daerah Kabupaten Lembata.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang melakukan penelitian lanjutan, yakni terhadap aktiva tetap daerah yang lainnya.